

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berperan penting bagi setiap negara, terutama di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Setiap perusahaan harus mampu beradaptasi pada era digitalisasi untuk mendorong efisiensi kinerja perusahaan mulai dari manajemen sumber daya manusia, sistem kerja, hingga penyusunan dokumen perusahaan yang selalu terintegrasi oleh sistem perusahaan. Digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam berbagai sektor, tetapi juga dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka untuk semua pihak (Dwijandono, 2024).

Setiap perusahaan tentu membutuhkan sumber pendanaan yang kuat untuk bisa lebih optimal dalam bisnisnya (Bagu et al., 2021). Salah satu perwujudannya, banyak kehadiran perusahaan terbuka agar bisa mendapatkan sumber pendanaan dari masyarakat retail, tidak hanya investor besar saja. Fenomena ini menjadikan persaingan bisnis semakin ketat dan kompetitif sehingga perusahaan dituntut untuk terus memberikan kinerja terbaiknya kepada pemangku kepentingan. Kinerja perusahaan yang optimal dapat tercermin dalam laporan keuangan yang transparan dan akurat, yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Larum et al., 2021).

Laporan keuangan memberikan gambaran pada kondisi perusahaan secara finansial, kinerja, serta aktivitas operasional dalam periode tertentu. Menurut PSAK 201 Tahun 2022 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas dalam periode yang sama. Selain itu, laporan keuangan juga mencakup catatan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi tambahan lainnya atau yang dikenal sebagai Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Pihak internal meliputi pemilik, dewan direksi dan manajemen, pemegang saham, komite audit, auditor internal, dan karyawan. Sedangkan, pihak eksternal meliputi investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum (Kieso et al., 2020). Penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia harus mengikuti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang telah disesuaikan menjadi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK), dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (Lestari, 2024). Namun dalam beberapa praktik lapangan, tidak semua manajemen perusahaan menyadari pentingnya penyajian laporan keuangan yang transparan dan bebas dari kecurangan (Kismawadi et al., 2020). Banyak perusahaan lebih mengutamakan citra yang baik di mata pemangku kepentingan, sehingga terkadang segala informasi dalam laporan keuangan disajikan untuk kepentingan dan tujuan tertentu.

Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan atau *fraud*, karena laporan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kecurangan dalam laporan keuangan ini dikenal dengan istilah *fraudulent financial statement* (Jalil et al., 2024).

Fraud adalah segala bentuk tindakan dan perbuatan pemipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan yang berdampak pada salah saji material dalam laporan keuangan (Noviany, 2020). *Fraud* menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, baik dari segi citra maupun nilai perusahaan, terutama ketika tindakan *fraud* telah terdeteksi (ACFE, 2024). Tidak hanya itu, *fraud* berdampak pada hilangnya kepercayaan dari investor dan pemangku kepentingan lainnya, menciptakan gangguan dalam persaingan pasar, serta menurunkan moral karyawan. Fenomena ini semakin marak terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemudahan dalam melakukan transaksi modern (Skoczylas-Tworek, 2022).

Fenomena kecurangan di sektor perbankan Indonesia sepanjang 2019-2023 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional tetap menjadi risiko sistemik yang mengancam integritas pelaporan keuangan. Pada periode 2021–2023, Bank BJB melakukan mark-up anggaran iklan senilai Rp 200 miliar, di mana hasil audit BPK menemukan selisih antara nilai anggaran promosi dan pembayaran aktual kepada media, sehingga mengindikasikan adanya manipulasi pengeluaran operasional yang berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan (Muhid, 2025).

Kasus serupa pada 2022 juga terjadi di BTPN Syariah Cabang Binuang, ketika seorang eks Community Officer menggelapkan dana pencairan kredit milik 17 nasabah sebesar Rp 55 juta dengan menyerahkan dana secara parsial dan memberikan informasi palsu mengenai status pencairan dari bank (Faturrahman, 2022). Sementara itu, di BRI pada 2020–2021, karyawan BRI dan suaminya memanfaatkan kelemahan verifikasi identitas untuk membuka puluhan rekening fiktif, mengajukan kartu kredit prioritas menggunakan 41 identitas orang lain, dan menggunakannya untuk transaksi pribadi sehingga mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 5,1 miliar (Kurnia, 2023). Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa fraud di sektor perbankan terjadi pada berbagai level, mulai dari manipulasi anggaran berskala besar hingga penyimpangan operasional oleh pegawai, yang semuanya memanfaatkan celah dalam proses supervisi, verifikasi identitas, serta pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Employee* (KYE). Secara keseluruhan, fenomena ini menegaskan urgensi penguatan sistem pengendalian internal, implementasi prinsip *good corporate governance*, serta peningkatan sistem deteksi dini guna menjaga integritas informasi keuangan dan kredibilitas sektor perbankan.

Cressey (1953) menjelaskan beberapa penyebab utama dari *fraud*, atau sering dikenal sebagai *Fraud Triangle*. *Fraud Triangle* terjadi karena adanya tiga faktor utama yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini kemudian dikembangkan menjadi *Fraud Diamond* dengan menambahkan faktor kemampuan (*capability*),

yang menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya memiliki niat untuk melakukan kecurangan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selanjutnya, *Fraud Pentagon* menambahkan faktor kesombongan (*arrogance*) sebagai salah satu penyebab seseorang merasa kebal terhadap aturan yang berlaku. Terdapat model teori fraud yang terbaru saat ini, yaitu *Fraud Heptagon* yang menyempurnakan model-model sebelumnya dengan menambahkan dua faktor baru, yaitu ketidaktahuan (*ignorance*) dan keserakahan (*greed*) (Handoko et al., 2022).

Elemen pertama dari *fraud heptagon* yaitu *pressure*. *Pressure* atau tekanan diproksikan dengan variabel stabilitas keuangan. Suatu perusahaan dianggap memiliki stabilitas keuangan yang baik jika mampu untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien serta menilai dan mengelola risiko keuangan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrianti et al. (2020) menunjukkan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap *fraudulent financial statements*.

Elemen kedua pada *fraud heptagon* adalah *opportunity* atau peluang. Peluang dapat diproksikan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan yang tidak efektif merupakan kondisi di mana pengawasan perusahaan terhadap kinerja keuangan lemah atau tidak berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Setyono et al. (2023), menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statements*.

Elemen ketiga pada *fraud heptagon* adalah *rationalization* atau rasionalisasi. Dalam sikap rasionalisasi, pelaku berupaya untuk membenarkan tindakannya karena tindakan tersebut terlihat masuk akal baginya (Larum et al., 2021). Rasionalisasi dapat diukur dengan banyaknya perubahan kebijakan akuntansi di perusahaan (Handoko et al., 2022). Hal sebagai alasan untuk menyesuaikan laporan keuangan untuk menutupi praktik kecurangan. Selain itu, pergantian auditor juga bisa digunakan dalam pengukuran rasionalisasi (Setyono et al., 2023). Pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dimungkinkan untuk menutupi praktik kecurangan laporan keuangan yang telah terjadi. Dalam penelitian Setyono et al. (2023) menemukan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif signifikan pada kecurangan laporan keuangan.

Elemen keempat dalam *fraud heptagon* adalah *capability* atau kapabilitas, yang merujuk pada kemampuan individu untuk memanfaatkan otoritas, pengetahuan internal, serta akses terhadap informasi sensitif perusahaan guna melakukan manipulasi tanpa mudah terdeteksi. Dalam hal ini, direksi memiliki peran penting dalam perusahaan karena mereka bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pergantian direksi sering kali dilakukan sebagai strategi perusahaan untuk menyembunyikan praktik kecurangan, dengan menggantikan individu yang patuh terhadap aturan dan tidak dapat diajak bekerja sama dalam melakukan kecurangan. Frekuensi pergantian direksi yang tinggi dapat memperpanjang proses adaptasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan budaya perusahaan menjadi kurang efektif.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Yustikasari & Sari (2024) yang menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara pergantian direksi dengan kecenderungan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan.

Elemen kelima pada *fraud heptagon* adalah *arrogance* atau arogansi. Arogansi merupakan sikap merasa superior dan serakah dari seseorang yang menganggap bahwa pengendalian internal perusahaan dibuat untuk orang lain dan tidak berlaku bagi dirinya sendiri (Rizqi & Purwanto, 2022). Sikap ini dapat muncul karena beberapa faktor umum, seperti posisi penting dalam perusahaan serta kewenangan untuk mengarahkan jalannya perusahaan. Frekuensi foto CEO di laporan keuangan dan hubungan politik CEO di pemerintah dapat digunakan dalam mengindikasi arogansi. Frekuensi foto CEO yang lebih tinggi dilakukan karena adanya rasa keinginan untuk meningkatkan eksistensi dirinya kepada publik. Hal ini searah dengan temuan Haqq & Budiwitjaksono (2020) bahwa frekuensi foto CEO berpengaruh positif signifikan dalam kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Elemen Keenam pada *fraud heptagon* adalah *ignorance* atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan seseorang terjadi karena salah mengira bahwa dirinya memiliki cukup pengetahuan untuk mengambil keputusan tanpa mencari klarifikasi lebih lanjut, sehingga cenderung mengabaikan informasi yang valid namun bertentangan dengan keyakinannya (Handoko et al., 2022). Handoko et al. (2022) mengungkapkan bahwa ketidaktahuan pada tindakan fraud disebabkan kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Semakin rendah pelatihan terkait dengan GCG,

maka fraud dianggap wajar bagi karyawan dan manajer. Penelitian dari Handoko et al. (2022) menunjukkan bahwa *Corporate Governance Course* tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraudulent financial statements*.

Elemen Ketujuh pada *fraud heptagon* adalah *greed* atau keserakahan. Dalam sikap keserakahan merupakan dorongan di luar batas kemampuan, yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan demi memenuhi gaya hidup (Handoko et al., 2022). Dalam upaya menampilkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih baik, manajemen melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Tindakan ini memungkinkan para eksekutif memperoleh keuntungan pribadi. Penelitian dari Soepriyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa keserakahan yang diproksikan dengan remunerasi eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

SCHEMES					
Category	Cases	25 th percentile	Median (50 th percentile)	75 th percentile	Mean*
Asset misappropriation	1,309	\$22,000	\$120,000	\$500,000	\$1,116,000
Noncash	246	\$10,000	\$66,000	\$250,000	\$537,000
Billing	207	\$25,000	\$100,000	\$448,000	\$624,000
Cash on hand	143	\$10,000	\$50,000	\$200,000	\$357,000
Skimming	130	\$10,000	\$43,000	\$200,000	\$205,000
Expense reimbursements	127	\$5,000	\$50,000	\$150,000	\$251,000
Check and payment tampering	109	\$26,000	\$155,000	\$510,000	\$787,000
Cash larceny	95	\$10,000	\$50,000	\$300,000	\$561,000
Payroll	74	\$10,000	\$50,000	\$250,000	\$383,000
Register disbursements	21	\$4,000	\$50,000	\$94,000	\$95,000
Corruption	662	\$50,000	\$200,000	\$1,000,000	\$2,738,000
Financial statement fraud	61	\$100,000	\$766,000	\$4,815,000	\$6,045,000

*Mean amounts were calculated using loss data that was winsorized at 5% (i.e., assigned all cases in the top 2.5% and bottom 2.5% the same value as the 97.5th percentile and 2.5th percentile, respectively).

Gambar 1.1 Kategori Kerugian pada 3 skema fraud

Sumber : ACFE *Report to The Nations* 2024

Menurut data *ACFE Report to The Nations* (2024), ditemukan sejumlah 1921 kasus *fraud* di seluruh dunia yang menyebabkan kerugian kurang lebih 3,1 Miliar Dollar, khususnya pada kasus financial statement fraud memiliki kerugian terbesar dibandingkan dengan dua jenis kecurangan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Sektor perbankan, sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana masyarakat, memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap isu fraud sehingga setiap bentuk manipulasi laporan keuangan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik secara luas.

Sesuai dengan gambar 1, *asset misappropriation*, memiliki 1.309 kasus dengan kerugian rata-rata (mean) sekitar \$1.116.000. Pada kategori *corruption*, terdapat 662 kasus dengan kerugian rata-rata (mean) sekitar \$2.738.000. Pada *fraudulent financial statements*, terdapat 61 kasus dengan kerugian rata-rata (mean) sekitar \$6.045.000.

Data *ACFE Report to The Nations* (2024) menjelaskan terdapat pembagian region untuk klasifikasi temuan banyaknya kasus dan rata-rata kerugian dari fraud, diantaranya adalah Asia-Pacific, Eastern Europe and Western/ Central Asia, Latin America and the Caribbean, Middle East and North Africa, Southern Asia, Sub-Saharan Africa, United States and Canada, Asia-Pacific Western Europe. Adapun temuan kasus terbanyak berada di region United States and Canada dengan total sebesar 613 kasus dan total kerugian 1 juta Dollar, namun dari rata-rata kerugian terbesar ditemukan berada di region Asia-

Pacific dengan jumlah kerugian sebesar 2 juta Dollar dan jumlah temuan kasus yaitu sebanyak 179 kasus. Menariknya, Indonesia menduduki peringkat ke 3 temuan fraud di region Asia-Pacific.

Total kerugian dari fraud yang terjadi di Indonesia mencapai angka sebesar 873 miliar rupiah dengan rata-rata kerugian per kasus sebesar 7 miliar rupiah (ACFE, 2019). Kasus *fraud* yang paling banyak ditemukan di Indonesia ada pada sektor Bank dan Layanan Finansial sebesar 41,4% dari keseluruhan kasus. Hal ini searah dengan temuan ACFE *Report to The Nations* 2024 menunjukkan bahwa sektor perbankan dan layanan finansial menempati posisi tertinggi dalam kasus *fraud* global, dengan total 305 kasus atau sekitar 15,8% dari 1.921 kasus. Selain itu, penelitian terdahulu memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris terkait elemen-elemen Fraud Heptagon. Beberapa variabel ditemukan signifikan dalam beberapa penelitian, tetapi tidak signifikan dalam penelitian lainnya. Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas setiap elemen fraud sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri, tingkat regulasi, serta struktur tata kelola perusahaan, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks sektor perbankan yang memiliki dinamika pengawasan berbeda dari sektor lainnya.

Sehingga dari penjelasan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang dilakukan peneliti adalah **“Pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap *Fraudulent Financial Statements* menggunakan metode Beneish M-Score (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023).**

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membuktikan apakah *fraud heptagon* di Indonesia dapat mempengaruhi *fraudulent financial statements*, khususnya di sektor perbankan. Berikut adalah rincian rumusan masalahnya:

1. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
3. Apakah *rationalization* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
4. Apakah *capability* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
5. Apakah *arrogance* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
6. Apakah *ignorance* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?
7. Apakah *greed* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statements*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *pressure* terhadap *fraudulent financial statements*.
2. Menganalisis pengaruh *opportunity* terhadap *fraudulent financial statements*.

3. Menganalisis pengaruh *rationalization* terhadap *fraudulent financial statements*.
4. Menganalisis pengaruh *capability* terhadap *fraudulent financial statements*.
5. Menganalisis pengaruh *arrogance* terhadap *fraudulent financial statements*.
6. Menganalisis pengaruh *ignorance* terhadap *fraudulent financial statements*.
7. Menganalisis pengaruh *greed* terhadap *fraudulent financial statements*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan *Fraud Heptagon* dalam analisis *Financial Statement Fraud* menggunakan metode Beneish M-Score.
2. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam laporan keuangan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini menyediakan referensi tambahan terkait teori *Fraud Heptagon* dalam praktik *fraud*.
4. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi dasar peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut mengenai *fraud heptagon* dalam pencegahan *fraud* dalam sektor lain maupun dengan pendekatan metodologi yang lebih luas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan *Fraud Heptagon* dalam analisis *Fraudulent financial statements*.
2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat mekanisme dalam tata kelola dan pengawasan internal.
3. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi investor dalam mengidentifikasi potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan yang mereka miliki.